



KAMIS, 12 APRIL 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Diduga Rugikan Negara Rp12 M Kejati Lidik TPP Seluma

BENGKULU, BE - Awal 2018 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, melakukan penyelidikan dugaan korupsi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, 2017. Anggaran TPP tersebut selama setahun cukup fantastis nilainya, mencapai Rp 50 miliar. Diduga dari anggaran tersebut negara telah dirugikan Rp 12 miliar. "Iya kita ada menyelidiki dugaan korupsi TPP di Seluma, 2017. Anggarannya sekitar Rp 50 miliar, diduga ada kerugian Rp 12 miliar."

Saat ini kita masih fokus meminta keterangan sejumlah pihak dari Pemda Seluma, kasus ini akan masih penyelidikan," jelas Kejati Bengkulu Baginda Polin Lumutan Gaol SH MH melalui Aspidus Kejati Bengkulu, Henri Nalngofan SH MH. Masih dikatakan Aspidus, pada tahap penyelidikan ini, masih akan mencari ahli apakah dugaan korupsi TPP

tersebut termasuk dalam kesalahan administrasi atau sudah ada indikasi korupsi didalamnya. Bahkan Kejati juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen Anggaran terkait aturan besaran TPP yang harus dibayarkan pada tingkat kabupaten. Karena jika dilihat TPP yang diterima pejabat di Pemkab Seluma cukup besar

untuk ukuran Kabupaten. Mereka menerima Rp 14 juta sampai Rp 16 juta. "Kita lihat begitu besar mereka mendapatkan TPP padahal tingkat Kabupaten, apakah tidak lebih bagus jika anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang akan kita dalam, kita akan berkoordinasi dengan Mendagri, Dirjen Anggaran dan mencari keterangan ahli," imbuh Aspidus. "Bukti jika Kejati serius mendalami dugaan korupsi tersebut dilihat dari pemanggilan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Seluma. Terbaru Asisten I Pemkab Seluma Mirin Ajib memenuhi panggilan Kejati untuk diminta keterangan, Rabu (11/4). Selain Asisten I, Kejati juga memanggil salah satu Kabid di BPKAD Seluma, Mirin Ajib yang datang mengenakan pakaian kemeja putih tidak banyak

berkomentar. Bahkan saat ditanya awak media dia mengkalat karena Kejati tidak ada kaitannya dengan TPP. "Bukan terkait TPP, ada urusan lainnya," singakt Mirin Ajib sembari menuju ruang Pdsus Kejati Bengkulu. Dugaan korupsi tersebut diselidiki berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan tersebut menyebutkan jika besaran TPP yang ditetapkan oleh TAPD tidak sesuai dengan beban kerja ASN di Pemkab Seluma. Besaran TPP pada OPD termasuk kedalam TP4D jabatan Kabid besaran TPP-nya Rp 16 sampai Rp 14 juta satu bulan. Besaran TPP tersebut lebih besar dari kepada OPD tipe A seperti Kadis yang hanya menerima Rp 13 juta. Bahkan jabatan sekelas Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP Rp 12 juta. (167)